

Kebijakan Program Kemitraan Ekonomi Umat Tahun 2018-2019



Kebijakan Program Kemitraan Ekonomi Umat (PKEU) dimulai pada pertengahan 2017 sampai akhir 2019. Latar belakang dari program ini adalah Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) untuk mengatasi fenomena ketimpangan atau kesenjangan ekonomi di desa dan kota, serta Hasil Kongres Ekonomi Umat MUI yang mendorong lahirnya Arus Baru Perekonomian Indonesia. Dalam rangka mengawal arus baru ekonomi tersebut, terbentuklah Komite Kemitraan Ekonomi Umat dalam bentuk Keputusan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Nomor 272 Tahun 2018.

Tujuan PKEU ini adalah untuk mendorong pemerataan dan mengurangi kesenjangan ekonomi umat melalui peningkatan keterampilan, kewirausahaan, dan kesempatan berusaha masyarakat dengan prinsip inklusif, afirmatif, pemberdayaan dan berkelanjutan, melalui tiga pilar kegiatan, yaitu vokasi, kewirausahaan, dan kemitraan.

Dalam implementasinya, program ini fokus pada sektor prioritas, antara lain: sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa, serta industri, dengan penerima manfaat, di antaranya adalah pesantren, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan Organisasi Masyarakat (Ormas). Implementasi PKEU selama tahun 2018-2019 telah mencakup 110 lokus kabupaten/kota yang tersebar di 30 provinsi, dengan keterlibatan 27 pelaku usaha besar dan 13 kementerian/lembaga pemerintah.

Seperti apa hasil evaluasi dan usulan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan capaian implementasi PKEU periode 2018-2019 tersebut, silakan baca dalam laporan berikut ini.